

Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Barat

Policy Strategy of Covid-19 Handling Toward Regional Economic Recovery of West Java Province

Lia Fitrianingrum

Pemerintah Propinsi Jawa Barat

ABSTRAK

Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa barat menjadi isu yang relevan dan krusial saat ini. Mengingat Jawa barat sebagai kontributor terbesar dari sisi ekspor dari Januari – Desember 2020 yaitu sebesar 16.28%. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif ekplanatif dengan sumber data studi literatur, laporan mingguan komite penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, notulensi rapat, dan media daring yang kredibel . Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Beberapa strategi kebijakan dari hasil kajian diantaranya regulasi yang secara afirmatif mendukung dan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta adanya program percepatan penanganan Covid-19 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat di tahun 2021 guna makin mempercepat proses penanganan Covid-19. Beberapa program kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 yakni program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dengan rencana lokasi implementasi di 100 puskesmas di 12 Kabupaten/Kota dan program petani milenial. Strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelik merupakan strategi unggulan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat berbasis kolaborasi, koordinasi dan hubungan interaksi antar aktor kebijakan. Model pentahelik didukung oleh temuan baru dalam kajian ini yakni kepemimpinan yang aspiratif dan dari unsur kelembagaan dengan dibentuknya Satgas Covid di tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.

Kata Kunci: strategi, kebijakan, penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, Propinsi Jawa Barat

ABSTRACT

The strategy of West Java Provincial Government in handling Covid-19, especially in relation to the regional economic recovery is a relevant and crucial issue at present. Given that West Java is the largest export contributor from January to December 2020, amounting to 16.28%. The method used in this paper is an explanative qualitative method, and the data sources used are literature studies, weekly report of the West Java Provincial Government's Covid-19 handling committee, minutes of meeting, and credible online media. This study also aims to provide an overview of how the policy strategy for handling Covid-19 in the regional economic recovery of West Java Province. Several policy strategies from the results of the study include regulations that affirmatively support and become the legal umbrella for handling Covid-19 in West Java Province which is carried out continuously from 2020 to present, as well as the acceleration program for handling Covid-19 launched by the Governor of West Java in 2021 in order to further accelerate the process of handling Covid 19. Several policy programs in

economic recovery in 2021, namely: the PUSPA program (Integrated and Champion Health Centers), which will be implemented at 100 health centers in 12 districts / cities, and the millennial farmer program. Policy strategy for handling Covid-19 using the pentahelix model is the main strategy carried out by the West Java government based on collaboration, coordination and interaction between policy actors. The Penta helix model is supported by new findings in this study, as aspirational leadership and from institutional elements with Covid official (satgas) at the Provincial, Regency and municipality Government in West Java.

Keywords: *strategy, policy, Covid-19 handling, economic recovery, West Java Province*

A. Pendahuluan

Desember 2019 merupakan awal dari mewabahnya *Corona Virus Diseases* atau Covid-19 di Wuhan, China. Sampai saat ini Covid 19 sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia sehingga dapat dikatakan sebagai status darurat. Di Indonesia sendiri mewabahnya Covid-19 diumumkan pada awal Maret 2020 dan menjadi pandemi hingga saat ini. Adanya pandemik global yang makin meluas maka beberapa langkah dilakukan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pandemi mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi selain kesehatan, dan sering terjadi tumpang tindih kepentingan, daya rentan dan keutamaan antara aspek ekonomi dan kesehatan. (Nugroho, Suprpto, Yesinta, & Soraya, 2020). Kerentanan ekonomi menurut Seth dan Ragab (2012) khususnya ekonomi makro memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan, walaupun kemiskinan biasanya lebih memberikan dampak pada kerentanan ekonomi mikro. Guncangan dan ketidakstabilan tidak hanya menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, namun juga menyebabkan orang-orang terperangkap dalam kemiskinan (Seth & Ragab, 2012).

Ciri struktur ekonomi yang perlu dibangun agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi diantaranya (Nugroho, Suprpto, Yesinta, & Soraya, 2020):

1. Mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas yang sangat strategis, misalnya komoditas

pangan (beras, gandum, jagung, gula, dll) dan komoditas energi (minyak dan gas).

2. Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditi atau bahan mentah.
3. Menjaga agar perkembangan sektor keuangan beriringan dengan berkembangnya sektor riil.
4. Melakukan pendalaman pasar keuangan (*financial market deepening*).

Agar terhindar dari ketergantungan impor, maka kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah perlu untuk diarahkan menyediakan komoditas-komoditas tersebut dari dalam negeri. Apabila negara tidak mampu menyediakan dan bergantung pada impor, maka terancam mengalami gangguan apabila *supply* barang-barang tersebut berkurang dan harganya melambung (*gejolak term of trade*). Seperti pada kondisi pandemik saat ini dimana pergerakan menjadi sangat terbatas, tentunya akan mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi, berdasarkan hasil pemodelannya menyatakan bahwa hasil ekonomi di semua negara dengan dasar bahwa Covid-19 dapat menurunkan baik *output* maupun produktivitas selama setahun dengan skala dampaknya dapat diukur dalam penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) (Thrope & Loughridge, 2020). PDB merupakan ukuran dari output bersih suatu negara yang sering digunakan sebagai ukuran kesejahteraan dan menjadi tolok ukur standar untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara.

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah, seperti yang dilakukan di pemerintah Propinsi Banten. Pengelolaan keuangan negara di Banten melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk fokus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial (Sanjaya, 2020).

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada pengelolaan keuangan di daerah juga memiliki efek terhadap perekonomian di daerah, maka di tahun 2021 ini masing-masing daerah berstrategi dalam rangka pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan kunci penanganan Covid-19 di Indonesia (Santoso, 2020). Hal ini juga menjadi pengalaman di negara lain dalam penanganan Covid 19 seperti di India, daerah (distrik) menjadi fokus desentralisasi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 (Mishra et al, 2020).

Dalam konteks kedaerahan atau kebijakan yang berlandaskan pada situasi di tingkat lokal dinilai tepat untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Pusat (Surabhi, 2020). Pengalaman Korea Selatan dalam keberhasilan penanganan Covid 19 dapat dijadikan rujukan, bahwa kombinasi antara kepemimpinan di level pusat yang tegas dengan sistem desentralisasi yang kuat dan terbuka guna pengalokasian sumber daya yang ada secara fleksibel. Kondisi tersebut membuat kebijakan yang telah dibuat, seperti identifikasi awal ancaman, peningkatan kapasitas diagnosis, sampai mobilisasi sumberdaya untuk penanganan kesehatan dapat berjalan dengan efektif. Hal inilah yang selanjutnya membuat Korea berubah dari negara terparah kedua di awal penyebaran Covid-19 menjadi salah satu negara terbaik dalam mengatasi pandemi Covid-19 (Juhwan, 2020).

Meskipun sudah banyak studi mengenai praktik sentralisasi dan desentralisasi dalam penanganan Covid-19, antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi tidak ada yang benar-benar mutlak dalam membuat keputusan kebijakan kesehatan publik yang tepat di tengah pandemi. Masing-masing negara akan melakukan penyesuaian dan mempelajari praktik kesuksesan dan kegagalan yang sudah dilakukan di tempat lain sehingga akan mendapatkan satu model kebijakan yang dianggap sesuai (Dobbs, 2020). Apabila dilihat dari proses hubungan pusat dan daerah, maka tidak hanya pemerintah Pusat yang juga melakukan pemulihan ekonomi dalam lingkup nasional.

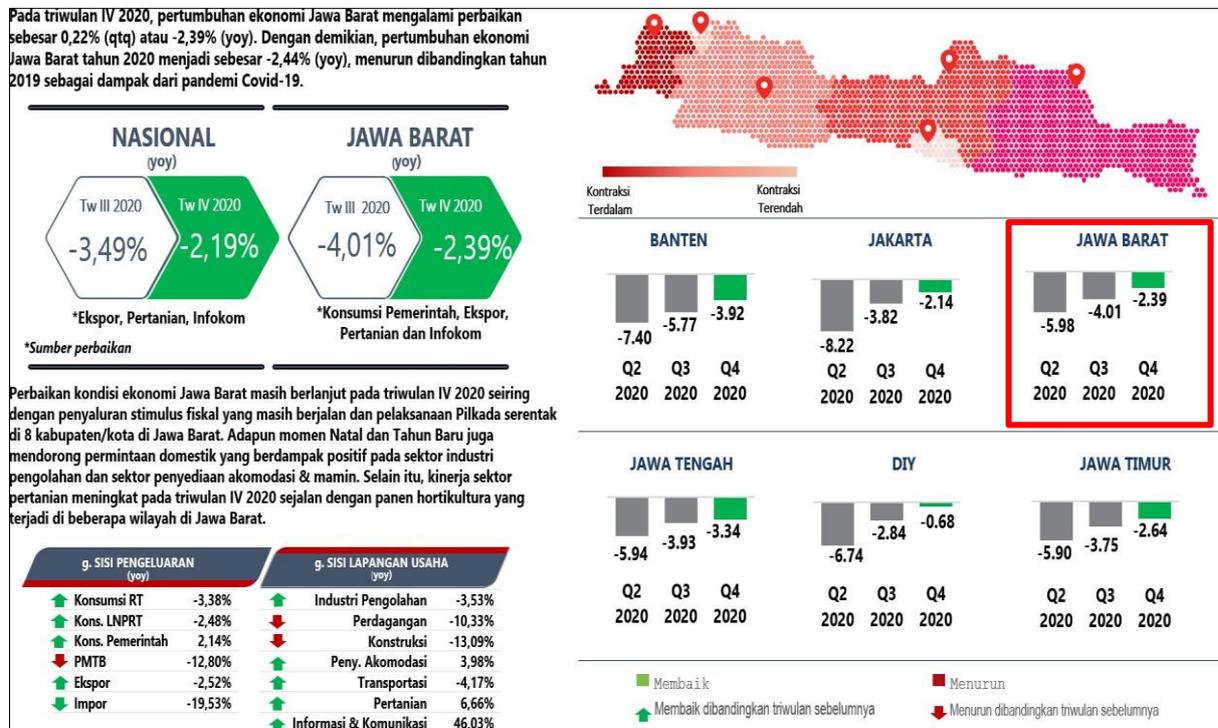
Pemerintah daerah secara regional juga melakukan pemulihan ekonomi berdasarkan azas desentralisasi dengan tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam pemulihan ekonomi di masa pandemik Covid 19 ini. Salah satu propinsi terbesar di Indonesia yang juga berusaha memulihkan ekonominya adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan beberapa regulasi dalam rangka pemulihan perekonomian di Jawa Barat seperti kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Barat yakni SE Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor: 72/KS.13/ HUKHAM Tanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Covid 19 di Propinsi Jawa Barat.

Dalam SE Gubernur tersebut menyebutkan bahwa terdapat 20 Kabupaten/Kota yang harus melakukan PPKM sesuai Imendagri 1/2021. Pemerintah Propinsi Jawa Barat juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No 443/Kep.10-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan PSBB Proporsional di 20 Kab/Kota di Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan adaptasi Kebiasaan Baru di 7

kab/Kota di Jawa Barat mempunyai dampak langsung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang meningkat 30-40%.

Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Barat sendiri dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Barat

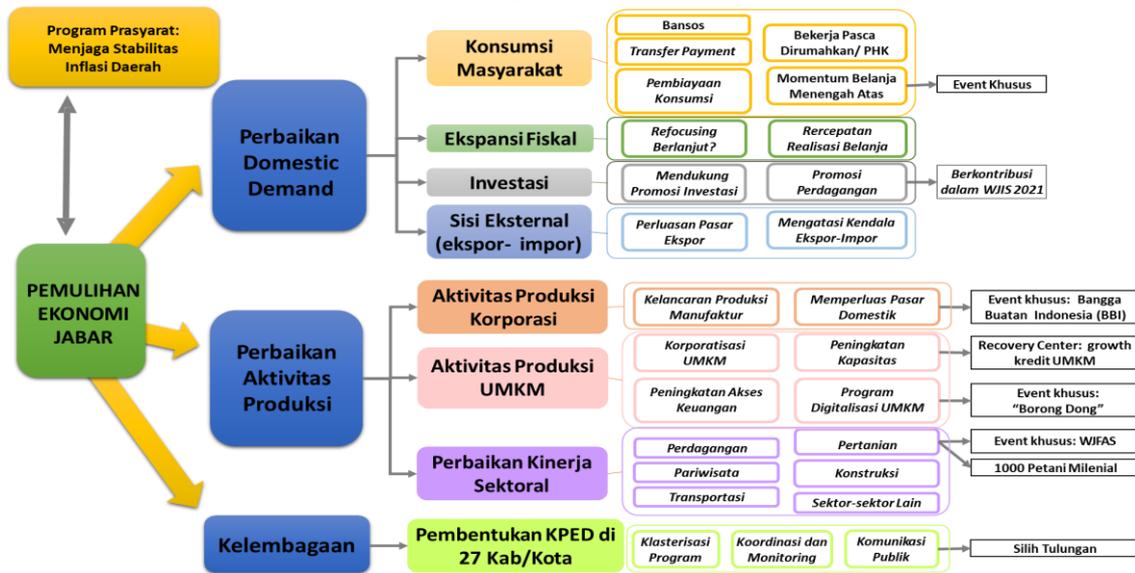


Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa Jawa Barat pertumbuhan ekonomi meningkat di triwulan ke empat sebesar -2,39% dibandingkan dengan triwulan ketiga yaitu sebesar -4,01 walaupun meningkat tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Perbaikan kondisi ekonomi terus diupayakan dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Barat sesuai target yang ditetapkan yakni -1% di triwulan keempat. Adapun fokus pemulihan ekonomi di Jawa Barat meliputi perbaikan *domestic demand*, perbaikan aktivitas produksi dan kelembagaan, seperti pada Gambar 2 di bawah.

Dari Gambar 2 di bawah dapat terlihat bahwa pemulihan ekonomi Jawa Barat berkaitan dengan perbaikan *domestic demand*, perbaikan aktivitas produksi dan kelembagaan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat. Terkait pentingnya pemu-

lihan ekonomi di Jawa Barat secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan warga Jawa Barat, maka dibutuhkan strategi penanganan Covid-19 Propinsi Jawa Barat dengan melibatkan peran masing-masing aktor secara aktif dalam implementasi kebijakan.

Gambar 2. Fokus pemulihan ekonomi di Jawa Barat



Sumber: Laporan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, 9 Februari 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana strategi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi kebijakan penanganan Covid-19 terutama pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan model pentahelik.

Model pentahelik merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait mencapai tujuan (Soemaryani, 2016). Kolaborasi pentahelik mempunyai peran penting untuk mendukung tujuan inovasi bersama dan pentahelik berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. (Halibas, Santiago, Sibayan, Rowena, & Rodriguez, 2016)

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell bahwa *"we conduct qualitative research because a problem or issue needs to be explored"* (Creswell, 2013) dengan metode analisis deskriptif yang bersifat eksplanatif untuk

menggambarkan kinerja jejaring dalam penanganan Covid-19, dalam hal ini menganalisis komposisi aktor disertai pola jaringan pada tataran struktur dan faktor-faktor penentu efektifitas kerja jaringan pada tataran proses. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sarantakos, 1993) bahwa penelitian deskriptif cocok digunakan untuk menjelaskan suatu sistem, relasi dan peristiwa sosial yang berlangsung dalam struktur dan proses agar diperoleh pemahaman tentang faktor penghubung dan isu-isu penting di dalamnya.

Obyek penelitian adalah strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, notulensi rapat dan observasi. Kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini (Rasdi & Kurniawan, 2020).

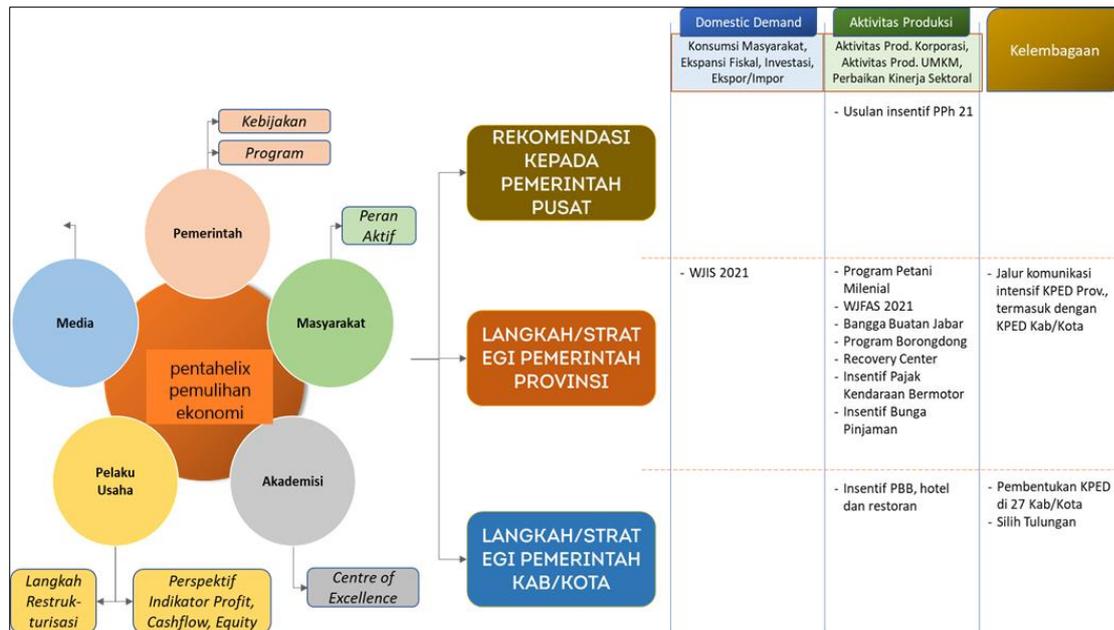
Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dilakukan dengan melakukan observasi partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai masalah

yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data atau informasi yang diperoleh dalam tahap pengumpulan data diuji keabsahannya salah satunya melalui teknik triangulasi sumber data (Patton, 2002).

D. Pembahasan

Berikut merupakan model strategi kebijakan Pemerintah Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelix (Gambar 3) berikut ini:

Gambar 3. Model Pentahelix Penanganan Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi

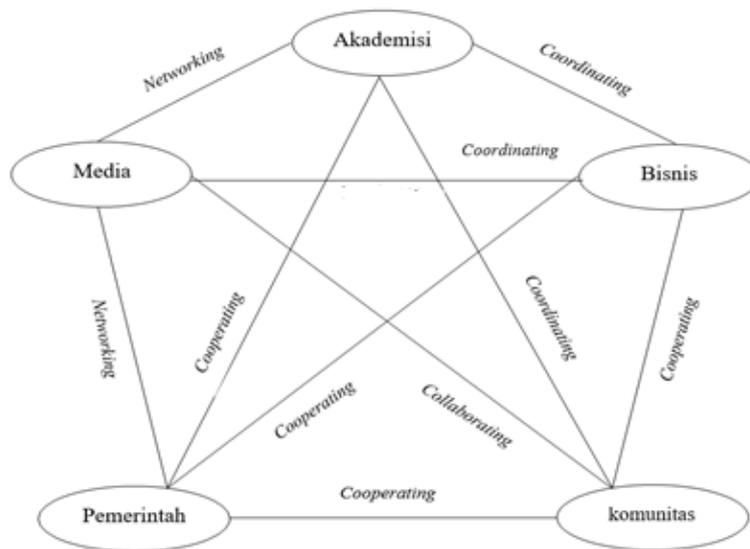


Sumber: Paparan Laporan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid 19, 9 Februari 2021

Dari Gambar 3 di atas terlihat bahwa setiap aktor memiliki perannya masing-masing dalam model kebijakan pentahelix pemulihan ekonomi di Jawa Barat dengan inovasi, kolaborasi, berkoordinasi dan berelaborasi dengan jejaring antar aktor yang terlibat dalam satu proses mewujudkan pemulihan ekonomi yang efektif antara pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah kota dan kabupaten masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media. Aktor kebijakan (*policy actor*)

merupakan *policy subsystem* dalam jejaring kebijakan antara *organization of the international system, organization of the society dan organization of the state*. Aktor kebijakan terdiri atas : 1) *elected officials* yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2) *appointed officials* atau pejabat politik yang ditunjuk pejabat politik terpilih duduk dalam birokrasi, 3) *interest group*, 4) *research organization*, 5) media massa (Howlett, Michael, & Ramesh, 1995).

Gambar 4. Model Pentahelik



Sumber: diolah dari model pentahelik (Howlett, Michael, & Ramesh, 1995)

Dalam Gambar 4 di atas, terlihat bahwa model pentahelik kunci utama keberhasilannya terletak pada koordinasi, hubungan yang interaktif semua aktor seperti akademisi, media masa, pemerintah, bisnis, dan komunitas. (Howlett, Michael, & Ramesh, 1995). Berikut peran masing-masing aktor-aktor dalam pemulihan ekonomi, yakni:

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan program.

Government, pada umumnya birokrasi, dipandang sebagai agen administrasi paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. (Yuniningsih, Darmi, & Sulandari, 2019). Pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan dan program dengan inovasi dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi. Melalui berbagai inovasi, daerah bisa melakukan berbagai cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Inovasi akan meningkatkan berbagai macam potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sehingga bisa memberikan nilai ketangguhan ekonomi daerah dan masyarakat. (Ra'is & Rohman, 2020).

Beberapa langkah strategis kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang sekarang sedang

dicanangkan di 2021 berupa petani milenial, bangga buatan Jabar, program Borongdong, kendaraan bermotor, insentif bunga pinjaman, WIFAS 2021.

Setiap program dan kebijakan pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu berbasis kolaborasi dimana ada keterlibatan masing-masing aktor, peran masing-masing aktor dan dalam memecahkan masalah serta memitigasi resiko secara bersama; digitalisasi; berbasis transformasi pelayanan publik dengan formasi yang baru menuju *dynamic governance*, ketersediaan sistem IT dengan infrastruktur yang baik dan lengkap dengan kanal internet protokol berbasis sinergi dan integrasi dengan jaringan terpadu di topang SDM yang kompeten.

Beberapa kebijakan utama pemulihan ekonomi di Jawa Barat, melalui program berikut:

- a. Borongdong merupakan satu program pemulihan ekonomi di Jawa Barat dalam bentuk *market-place* UMKM yang merupakan turunan dari program icalan (inovasi cara jualan) dengan *market* utama adalah ASN. Pada awal Februari 2021 mitra yang sudah

terdaftar sebanyak 260 mitra, bekerja sama dengan koperasi praja karena ASN anggota aktif koperasi tersebut. Mitra hanya berfungsi sebagai produsen saja, untuk promosi, *packing* sudah didukung borongdong.id. Program ini merupakan peningkatan sektor UMKM yang terkena dampak pandemi, serta populasi UMKM yang belum *Go Digital* sekitar 80%. Market dari Borongdong adalah ASN, karena pada pandemi penghasilan ASN tidak berpengaruh, dengan jumlah sekitar 300 ribu ASN di Jawa Barat sangat membantu pergerakan roda perekonomian khususnya sektor UMKM. Borongdong memotivasi kelompok 70% yang terkena dampak ekonomi yang ditolong oleh kelompok 30% yaitu ASN.

b. Petani milenial

Saat ini, sektor pertanian nampaknya belum menjadi magnet pekerjaan bagi generasi milenial di Jawa Barat. Jumlah petani muda di Jawa Barat masih relatif kecil. Padahal kita butuh tenaga baru di bidang pertanian yang merupakan penyumbang ekonomi terbesar ke-3 di Jawa Barat.

Program Petani milenial bertujuan menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja agar meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial menggerakkan kewirausahaan di bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan di Jawa Barat.

c. Insentif pajak kendaraan bermotor.

Berupa penghapusan denda tunggakan dan biaya balik nama (BBN). Selain itu, wajib pajak pun dibebaskan dari tarif progresif pokok tunggakan yang balik nama kebijakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2020.

Program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Barat dirancang dan dilaksanakan guna meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat sehingga pemulihan ekonomi akan ikut meningkat.

2. Media sebagai akselerator kebijakan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

Media merupakan salah satu mitra penting dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka model pentahelik, dimana setiap pihak bekerja sesuai perannya masing-masing. Pada perubahan dunia yang semakin cepat dan kompleks diperlukan adanya kolaborasi antar aktor terutama di masa pandemik Covid-19 sekarang ini.

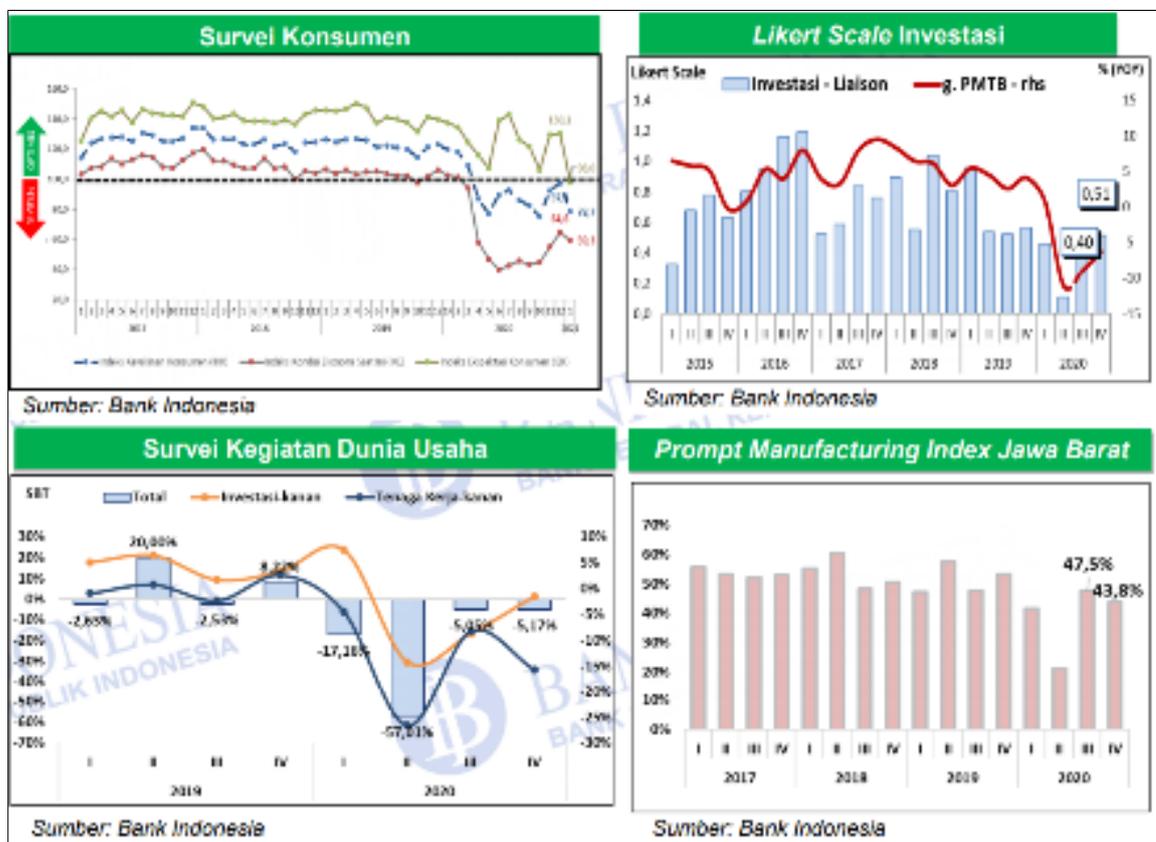
Menurut Roberts (2004) kolaborasi didukung dengan komitmen waktu yang ekstensif, kepercayaan yang tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan saling berbagi risiko. (Buckman & Robert, 2004).

Kolaborasi dan sinergitas antara Pemda Jawa Barat dengan media sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat mengenai kebijakan pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Data dari *World Economic forum 2020* menyebutkan bahwa di masa pandemi ini 50% generasi milenial dan Generasi Z menghabiskan waktunya untuk menonton YouTube, 47% Facebook dan 34% di Instagram. Kondisi seperti ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan program-program kerja dan kebijakan terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Media memiliki peran penting dalam sosialisasi dan edukasi, terutama soal penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah Provinsi Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar intens menjalin kerja sama dengan media untuk

- menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
3. Pelaku usaha sebagai kolaborator dalam pemulihan ekonomi.

Pemulihan perekonomian di Jawa Barat menurut data Bank Indonesia berlangsung secara bertahap seperti pada Gambar 5 di bawah ini .

Gambar 5. Pemulihan perekonomian di Jawa Barat



Sumber: Data Bank Indonesia, akses 2 Februari 2021

Dari data pada Gambar 5 di atas terlihat bahwa perbaikan ekonomi domestik ter-indikasi tertahan, terlihat dari hasil survei konsumen pada periode Januari 2021 menunjukkan level Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 78,7, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 97,4. Kinerja investasi berpotensi meningkat, terindikasi dari kenaikan *likert scale* pelaku usaha dari 0,40 menjadi 0,50 pada triwulan IV 2020, searah dengan perbaikan *business confidence*.

Peningkatan kegiatan usaha masih terbatas pada triwulan IV 2020, terindikasi pada Saldo Bersih Terimbang (SBT) hasil SKDU yang cenderung stabil dari -5,05% menjadi -5,17%. *Prompt Manufacturing Index* (PMI) juga masih terbatas pada

triwulan IV 2020 dari 47,5% pada triwulan II menjadi 43,8%.

Dari data di atas maka diperlukan upaya pemulihan ekonomi sinergis dalam waktu dekat terutama langkah bersama mendorong konsumsi masyarakat, khususnya kelompok menengah atas. Koordinasi dan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan.

Ada empat kelompok usaha komoditi (padi, unggas, jagung dan urban farming) sebagai peluang bisnis komoditas unggulan yang menjadi program atau kegiatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi

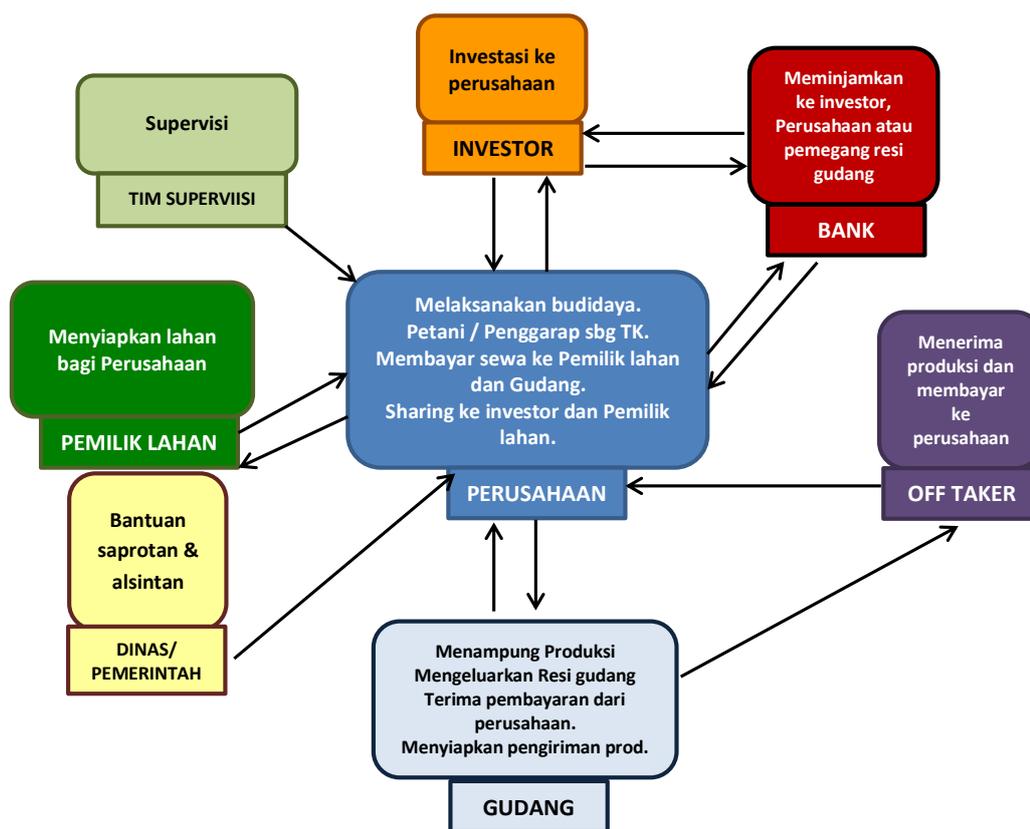
berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan model intervensi.

1. Model intervensi pada komoditas padi, Pemprov Jawa Barat berkolaborasi dengan Koperasi, BUMDes maupun badan hukum lainnya untuk memfungsikan gudang sebagai bisnis yang dikelola korporasi, mengubah transaksi, semula budidaya sampai gabah, menjadi budidaya sampai beras dengan produk turunannya yang dikenal dengan Intervensi Resi gudang (*closed loop business*). Implementasi lokasi ada di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang dan Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
2. Model intervensi pada komoditas unggas, beberapa langkah dalam rangka kolaborasi dengan pelaku usaha adalah sebagai berikut:
 - a) Korporasi pola kluster, kawasan pengembangan industri peternakan ayam pedaging, dilakukan korporasi (koperasi, Bumdes, PT dan badan hukum lainnya). Peran BUMD/BUMN sangat diperlukan dalam melakukan intervensi perbibitan (*hatchery farm*), *feed mill* dan pengolahan serta pemasaran produk (Rumah potong ayam dan *cold storage*)
 - b) Kebijakan tingkat daerah (Pemprov Jawa Barat) dalam rangka restrukturisasi usaha ayam pedaging. Pasar domestik menjadi prioritas bagi produksi peternakan rakyat mandiri/terdampak pandemi Covid-19. Industri diprioritaskan pasar ekspor.

Feedmill, Breeding/Hatchery Industri: Produksi industri ini, dialokasikan bagi wilayah dimana mereka berada minimal 25% bagi pengembangan wilayah tersebut. Khususnya bagi wilayah produksi yang terdampak.

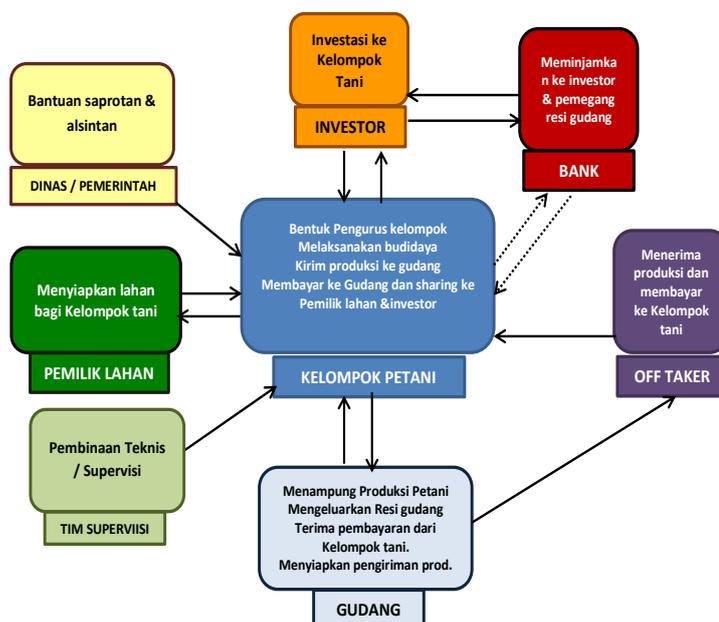
- c) Penguatan sumber daya manusia dan teknologi diperlukan perubahan sistem kandang terbuka (*open house*) skala kecil, beralih ke teknologi kandang tertutup (*closed house/semi closed house*). Perubahan Pola kelembagaan kelompok, dari individual ke koperasi (kelompok) dalam mengelola kandang *closed house*.
 - d) Kebijakan tingkat Nasional Permentan No. 32/2017 mengenai jaminan pasokan kebutuhan budidaya. Revitalisasi fungsi kelembagaan Pengawas Bibit Ternak (WASBITNAK) dan Pengawas Mutu Pakan (WASTUKAN) yang telah ada di tingkat nasional. Permendag No. 7/2020 mengenai penetapan harga acuan DOC, ayam hidup dan daging ayam, serta mekanisme penyerapan ayam hidup ketika mengalami penurunan harga melebihi Harga Pokok Produksi di tingkat peternak.
3. Model Intervensi kebijakan pada komoditas jagung Berikut merupakan model intervensi kebijakan pada komoditas Jagung sebagai berikut:
 - a) Pola korporasi, seperti pada gambar berikut ini (Gambar 6):

Gambar 6. Pola Korporasi

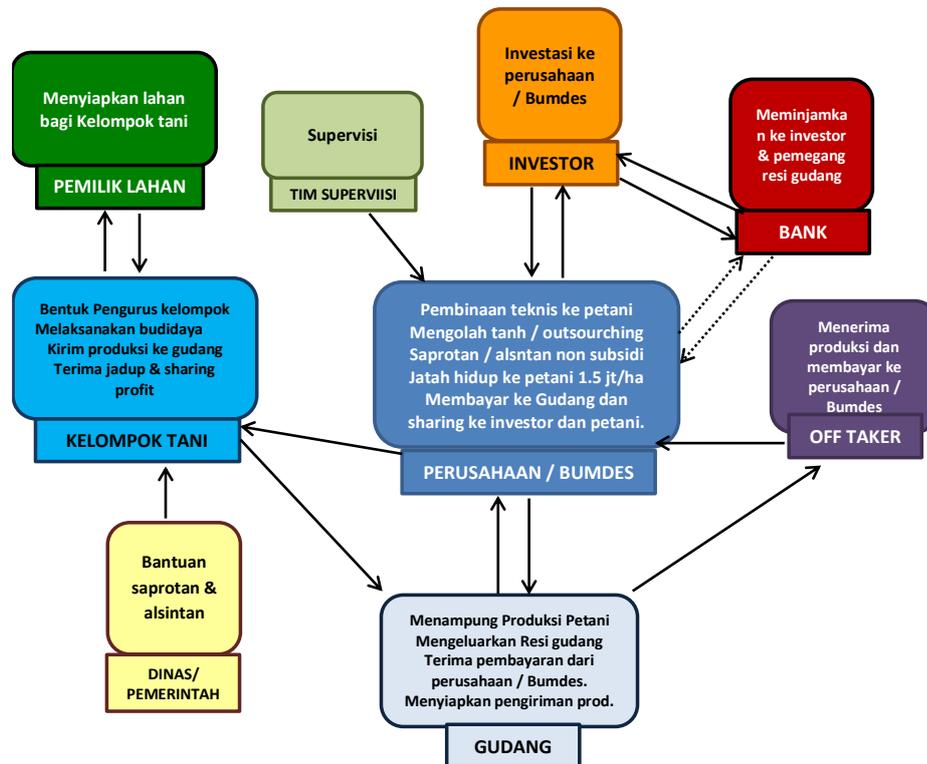


Sumber: paparan satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan, akses 9 Februari 2021

Dari gambar 6 di atas terlihat bahwa korporasi melaksanakan kegiatan industrialisasi jagung secara vertikal agribisnis (dari hulu ke hilir). Korporasi mendapatkan insentif, dalam sistem finansial dan sarana produksi dari pemerintah. Korporasi menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar.



b) Pola kelompok tani, seperti gambar di bawah ini (gambar 7)



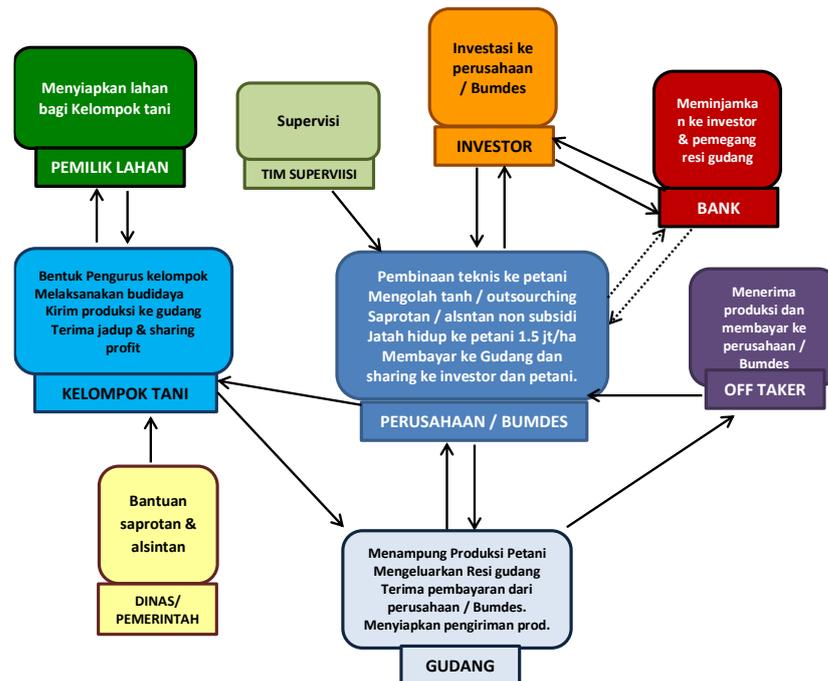
Gambar 7 Pola Kelompok Tani

Sumber: Paparan satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan, akses 9 Februari 2021

Dari gambar 7 di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok melaksanakan kegiatan industrialisasi jagung pada sub sistem budidaya dan kelompok mendapatkan insentif, dalam sistem finansial dan sarana produksi, teknologi dari pemerintah. Pasca produksi (resi gudang) ditangani oleh korporasi petani (koperasi/Bumdes) dan pasar kaptif melalui *off taker*.

c) Pola inti plasma, seperti gambar di bawah ini (gambar 8)

Gambar 8 pola inti plasma



Sumber: paparan satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan, akses 9 Februari 2021

Dari gambar 8 diatas dapat dijelaskan bahwa petani berkelompok (Plasma) melakukan kerjasama dengan korporasi (Inti). Kelompok tani melakukan budidaya dibina (*transfer knowledge*) dari korporasi. Saprotan dan Pasca produksi (resi gudang) ditangani oleh korporasi dan pasar kaptif melalui *off taker*. Inti memberikan biaya hidup pada waktu tunggu. Plasma mendapatkan insentif dari pemerintah (pupuk, bibit) dan inti mendapatkan fasilitas kredit finansial. Pembayaran melalui pola bayar saat panen.

4. Akademisi sebagai *centre of excellent*
Peran akademisi sebagai *centre of excellent*, dalam hal ini pemerintah Propinsi Jawa barat berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam mengimplementasikan program Petani Milenial yang merupakan salah

salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi dalam masa pandemi ini. Salah satu bentuk kolaborasinya ialah dengan pembentukan Divisi Inovasi dan Teknologi dalam program petani milenial, diketuai Rektor IPB, divisi ini membantu mengaplikasikan teknologi pertanian pada program Petani Milenial.

5. Peran aktif Masyarakat

Dalam pelaksanaan kebijakan Pemprov Jawa Barat harus ada rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki semangat dan motivasi. Menurut Simatupang partisipasi masyarakat tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dalam perencanaan kebijakan (Yuwono, 2001).

Kelompok strategis masyarakat Jabar dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar

skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan program kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi secara efektif dan efisien. Peran aktif masyarakat Jawa Barat merupakan faktor vital dalam implementasi penanganan Covid-19 di Jawa Barat, mengingat setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat fokusnya memang untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan merangsang pertumbuhan UMKM.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sikap gotong royong masyarakat Jawa Barat meningkat saling membantu, memberikan informasi mengenai isoman, donor plasma, saling memberikan dukungan bahan makanan untuk para isoman yang dikoordinir PKK RT meningkat.

Pemulihan ekonomi di Jawa Barat tidak terlepas dari kepemimpinan (*leadership*). Kaitannya dengan peran Pemerintah dalam hal ini *political will* pemimpin pusat dan pemimpin daerah menjadi sangat penting dalam membuat kebijakan strategis pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Peran pemimpin dipercaya mampu menyediakan ruang kreatif bagi peningkatan ekonomi di Jawa Barat. Pemimpin juga harus mampu menjawab pertanyaan terkait semua persoalan dalam menjalankan kewajibannya. (Thoha, 2009) Pemberdayaan sebagai hal penting dan strategis dalam peran kepemimpinan untuk mempersatukan wujud kepentingan yang seimbang antara individu, kelompok dan organisasi. Selain kepemimpinan yang kuat juga ada aspek kelembagaan yang memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi di Propinsi Jawa Barat yaitu dengan dibentuknya komite kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi daerah propinsi Jawa Barat

dan telah dibentuknya satgas pemulihan ekonomi daerah di 27 kabupaten/kota di propinsi Jawa barat yang saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemulihan ekonomi. Satgas covid 19 dalam rangka pemulihan ekonomi ini dipelopori oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang Ketua Hariannya langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat. Satgas Propinsi Jawa Barat ini menginspirasi dibentuknya satgas di 27 kabupaten kota di Jawa Barat yang koordinator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Satgas covid ini merupakan perwakilan berbagai elemen seperti dinas Kesehatan, TNI POLRI, satpol PP dsb.

E. Kesimpulan

Model pentahelik yang melibatkan peran aktif masing-masing aktor merupakan strategi kebijakan penanganan covid 19 Pemerintah Daerah propinsi Jawa Barat dalam dalam rangka pemulihan ekonomi hingga saat ini. Setiap aktor saling berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi sehingga terbentuk jejaring untuk bersama-sama dalam pemulihan perekonomian di Jawa Barat.

Selain aktor yang berperan secara optimal dalam model pentahelik seperti pemerintah, media, bisnis, akademisi dan komunitas, ditemukan bahwa kepemimpinan yang aspiratif dan menjadi *role model leadership* di Jawa Barat dan kelembagaan menjadi unsur lain yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Pembentukan satgas dan komite penanganan Covid-19 baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai salah satu bentuk kelembagaan dinilai efektif dalam mengkoordinir dan mengawal setiap kebijakan, mengkoordinasikan dengan berbagai pihak dalam rangka pemulihan ekonomi.

Saran kebijakan jangka pendek, pertama, penguatan layanan publik berbasis digital kepada masyarakat melalui transformasi digital KUKM dalam memasarkan produk. Kedua, optimasi pengembangan aplikasi pikobar <https://pikobar.jabarprov.go.id/> yang merupakan layanan informasi layanan Covid-19 satu pintu dan unggulan di Jawa Barat selain sebagai pusat informasi juga sarana komunikasi publik interaktif berbasis digital antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam memberikan layanan konsultasi medis dengan masyarakat terdampak. Ketiga aktualisasi kebijakan Covid -19 dengan memberikan bantuan sosial berkoordinasi dengan kementerian sosial.

Saran kebijakan jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat juga harus meningkatkan iklim investasi di Jawa Barat yang merupakan pasar potensial yang sangat besar terutama wilayah Patimban dan Jawa Barat bagian Selatan dengan menyediakan SDM yang produktif, mempermudah perijinan, menyediakan infrastruktur yang baik, meningkatkan kualitas layanan serta simplifikasi Peraturan Daerah terkait investasi. Dengan banyaknya investasi di Jawa Barat akan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan dapat membantu pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Kedua memberikan insentif kepada dunia usaha untuk merangsang jual beli.

Daftar Pustaka

Buku

Bogason, P., & Zolner. (2007). *Methods for Network Governance Research: An Introduction in P. Bogason & M. Zolner (eds), Methods in Democratic Network Governance.* New York: Palgrave Macmillan,.

Buckman, & Robert. (2004). *Building*

Knowledge-Driven Organization Building A Knowledge - Driven Organization: Overcome Resistance Free of Idons, : Overcome Resistance Free of Idons, Turn Knowledge into new products and service, move to a knowledge based strategy. New York: Mc. Graw Hill.

Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, third Edition.*

Dobbs. (2020). National Governance of Public Health Responses in a Pandemic? *European Journal of Risk Regulation*, Vol 11 (2), p 240-248.

Halibas, Santiago, A., Sibayan, Rowena, M., & Rodriguez, L. (2016). The Pentahelix Model of Innovation In Oman : An Hei Perspective. . *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, Volume 12.

Howlett, Michael, & Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem.* Oxford:: University Press.

Juhwan. (2020). National Response to COVID-19 in the Republic of Korea and Lessons Learned for Other Countries. *Health Systems & Reform*, Vol 6 (1).

Nugroho, R., Suprpto, A. F., Yesinta, N., & Soraya, I. A. (2020). *Dampak Covid 19 pada Ekonomi Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan.* Bandung: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.

Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods. Edisi Ketiga.* California: Sage Publications page 556.

Ra'is, & Rohman, A. (2020). Inovasi Daerah sebagai Sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan Pemulihan ekonomi. *KNIA 4.0*, 67-72.

Rasdi, & Kurniawan, T. (2020). Efektivitas kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam upaya penanggulangan

- kemiskinan sebuah tinjauan literatur. *Sosio Informal*, 97-112.
- Sanjaya, N. (2020). Regional Budgeting Policy In The Covid-19 Pandemic Era (Case Study at the Regional Government of Banten Province). *Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* Vo. 17 No 2, 273-290.
- Santoso, T. (2020). Relasi Pusat-Daerah Dalam Menangani COVID-19 Di Indonesia . *Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Vol 17 Nomor 2*, 161-177.
- Sarantakos. (1993). *Social Research*. Melbourne: Mac Millan Educational Australia Ltd.
- Seth, A., & Ragab, A. (2012). *Macroeconomic Vulnerability In Developing Countries: Approaches and Issues*. Poverty Group, Bureau for Development Polity: United.
- Soemaryani, I. (2016). Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Human Resource Development. *Academy of Strategic Management Journal*, Volume 15, Special Issues 3.
- Surabhi, M. (2020). Restricting Rural-Urban Connect to Combat Infectious Disease Epidemic as India Fights COVID-19. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, Vol 9 (4), p 1792-1794.
- Thoha, M. (2009). *Perilaku Organisasi*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Thrope, J., & Loughridge, J. (2020). *The Possible Economic Consequences Of A Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic*. Australia: Australia Matters.
- Yuniningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik dalam pengembangan Pariwisata di Kota Semarang, . *Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2*, 84 – 93.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. Semarang: UNDIP.